

Surat Kabar : KOMPAS

Edisi : 19 Desember 2014

Subyek : Banjir

Hal : 15

PENANGGULANGAN BANJIR

DKI Swakelola Proyek Normalisasi

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah DKI Jakarta akan mengelola sendiri proyek normalisasi, termasuk normalisasi sungai. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan rencana swakelola itu seusai rapat antisipasi banjir dan musim hujan di Balai Kota, Kamis (18/12).

Menurut Basuki, proyek normalisasi adalah proyek rutin yang dikerjakan setiap tahun. Dinas Pekerjaan Umum juga sudah memiliki alat berat yang bisa difungsikan dalam proyek normalisasi. Swakelola dilakukan untuk memangkas waktu pengadaan barang dan jasa yang selama ini melalui proses lelang. Pemangkasan waktu itu diharapkan mempercepat pengerjaan proyek.

Dengan swakelola alat berat dan pekerjaan terkait infrastruktur pengairan, pengerukan endapan, sumbatan sampah, dan penanganan lain terkait kebencanaan diharapkan lebih cepat. Selain itu, pemeliharaan saluran, sungai, dan waduk terkait tingginya laju pengendapan juga lebih cepat.

Dalam sistem swakelola, Dinas PU bertugas sebagai manajer. Dinas mengatur semua penggunaan alat berat dan bisa menginstruksikan langsung pengerjaannya. Sebelumnya, proyek normalisasi dilakukan dengan sistem lelang dan anggaran.

Basuki menambahkan, DKI Jakarta akan menambah jumlah alat berat untuk normalisasi sungai dan saluran.

Untuk mempermudah pembelian, Basuki berharap daftar harga barang masuk dalam sistem e-catalog. Sistem yang ada di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus diubah lebih fleksibel untuk mempercepat pengadaan barang dan jasa.

Pembebasan lahan masih menjadi kendala terbesar dalam normalisasi kali di Jakarta. Normalisasi Kali Pesanggrahan,

Angke, dan Sunter sejak 2011 hingga saat ini belum terselesaikan.

Kepala Bidang Pelaksanaan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Bastari mengungkapkan, dibutuhkan langkah konsisten pemerintah daerah dan pusat dalam pembebasan lahan untuk normalisasi kali.

Bastari memberikan contoh, normalisasi Kali Pesanggrahan yang sudah berjalan sejak 2011, itu baru bisa dapat dikerjakan 51 persen yang terwujud dalam perbaikan sepanjang 19,3 kilometer tebing kali. Padahal, batas akhir proyek jatuh pada 2016.

Normalisasi Kali Angke sudah berjalan 70,72 persen, dengan perbaikan tebing kali mencapai 22,5 km. Normalisasi Kali Sunter juga sudah berjalan 77,27 persen setara 20,9 km tebing kali.

44 lokasi rawan banjir

Pemerintah Kota Bekasi mewaspadai 44 lokasi rawan banjir menjelang datangnya puncak musim hujan di akhir 2014. Untuk itu, Pemkot Bekasi mendesak pemerintah pusat segera melakukan upaya penanggulangan bencana banjir dengan normalisasi sungai, situ, dan percepatan pembangunan sodetan.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, 44 lokasi rawan banjir tersebar di sepanjang Daerah Aliran Sungai Kali Bekasi serta di wilayah dengan elevasi yang lebih tinggi, seperti daerah perbatasan dengan Jakarta. Semua areal rawan banjir ini dapat diatasi jika pemerintah pusat menormalisasi Kali Bekasi, Situ Rawa Gede, dan mempercepat pembangunan empat sodetan yang mengarah ke Kanal Timur. (ILO/MDN/MKN/DEA)